

## BAB V

### KESIMPULAN

Bertitik tolak dari uraian bab-bab sebelumnya, beberapa hal dapat disimpulkan berkaitan dengan perkembangan kota Malang 1914-1940: Suatu tinjauan sosial-ekonomi. Tahapan perkembangan kota bermula dari eksistensi kota sebagai sebuah terminal pemberhentian bagi hasil-hasil pertanian dari daerah sekitar sebelum hasil bumi tersebut dikirim melalui pelabuhan Pasuruan. Kedua, penetapan Malang menjadi *gemeente* pada tahun 1914 yang merupakan kelanjutan dari undang-undang desentralisasi yaitu memberikan pemerintahan sendiri pada wilayah Karesidenan dan Kabupaten (*Regenschap*). Wilayah-wilayah hukum yang mandiri ini diperintah oleh dewan-dewan lokal yang akan dibentuk setelah pelimpahan kewenangan wilayah tersebut dilaksanakan. Namun di kota Malang perubahan status tersebut kurang memberikan keluasaan wewenang seperti maksud sebelumnya. Oleh karena itu para penguasa kota menghendaki adanya reformasi pemerintahan sebagai upaya perluasan wewenang dalam mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri. Maka peralihan sistem pun dilaksanakan, kota Malang yang semula berstatus sebagai *Gemeente* berubah menjadi *Stadsgemeente* pada tahun 1929. Pada tahap ini, dipimpin oleh Ir. A.E. Voorneman sebagai walikota, kota Malang mengalami masa kejayaannya. Kedudukan kota Malang sebagai *stadsgemeente* berada dibawah kewenangan propinsi dan menjadikan kota ini sebagai ibukota Karesidenan Malang yang membawahi Pasuruan, Probolinggo,

juga Lumajang. Struktur pemerintahan kota lebih kompleks dengan pembentukan dewan pemerintah daerah (*Wethouderschap*).

Perkembangan kota Malang secara fisik bisa langsung dilihat dari keberadaan infrastruktur yang ada didalam kota. Rencana-rencana pembangunan kota (*Bouwplan*) dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu antara tahun 1917-1938 disejumlah wilayah di kota Malang. Fasilitas-fasilitas kerakyatan seperti pemukiman, sekolah, lembaga-lembaga kesehatan, dan semua fasilitas disektor ekonomi banyak diusahakan pembangunan, perawatan, perbaikannya lewat rencana pembangunan (*houwplan*) ini. Jalan-jalan raya dihubungkan dari satu sector wilayah satu ke sector wilayah lain untuk memudahkan jangkauan menuju pusat kota.

Berbagai tahap perkembangan kota tentu saja membawa dampak tersendiri bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Kehidupan masyarakat kota semakin terlihat kompleks setelah pemerintah memberikan ruang gerak yang cukup luas. Mereka mengalir mengikuti perkembangan kota itu sendiri. Perubahan baik didalam segi sosial maupun ekonomi mendapatkan respon positif. Masyarakat yang bergerak dibidang perdagangan memperoleh lahan dan kemudahan untuk menjalankan aktifitas perdagangannya, demikian juga dengan mobilitas masyarakat disektor industri dan kepegawaian. Pemerintah sadar bahwa dari sekian banyak target pembangunan, satu titik pentingnya adalah faktor tenaga kerja, keterampilan dan kecekatan masih perlu dibenahi dari masyarakat pribumi dan semua golongan masyarakat. Prediksi pemerintah dalam hal ini adalah mewujudkan tercapainya keseimbangan antara lapangan pekerjaan dengan tenaga

pekerja. Sekolah-sekolah umum berdiri untuk mencetak seorang *ambtenaar* atau paling tidak menciptakan golongan baru pada stratifikasi masyarakat yang sebelumnya telah terbentuk. Stratifikasi ini adalah sebuah golongan masyarakat berpendidikan yang sedikit lebih tinggi dari masyarakat lainnya.

Selain gedung-gedung lembaga pendidikan terpenuhi, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit maupun klinik banyak didirikan dan diperbarui baik sistem pelayanannya maupun bangunan fisik pusat-pusat kesehatan di kotanya. Rumah sakit yang berkembang pesat di kota Malang sampai tahun 1940 antara lain *Zendingziekenhuis "Soekoen"* atau rumah sakit Sukun, *Lavalette Kliniek*, klinik yang pembukaannya diusahakan oleh golongan para pemilik perkebunan di kota Malang; Rumah sakit RKZ (*Roomsche Katholik Ziekenhuis*) *St. Magdalena Postel*, dan *Vereeniging Wijkverpleging*. Dana bantuan yang disalurkan pemerintah setiap tahunnya sebagai dana kesehatan digunakan untuk mencukupi pembiayaan rumah sakit atau klinik memberikan pelayanan bagi kaum miskin berobat. Golongan ini tidak saja berasal dari golongan pribumi saja namun golongan Eropa-pun sebagian besar masih membutuhkan pengobatan secara cuma-cuma.

Tahun 1914-1939 kota Malang berkembang sejalan dengan gerak masyarakatnya. Gerak tersebut tentu saja masih berada diatas jalur seperti yang dikehendaki oleh pemerintah penguasanya tanpa mengesampingkan faktor dominan masyarakat dan lingkungan. Artinya pemerintah tidak menciptakan suatu kondisi apabila masyarakat dan lingkungannya tidak mendukung. Salah satu contoh adalah didirikannya zona perdagangan, para pedagang yang telah

menduduki wilayah kota diberikan kesempatan berkembang secara baik. Begitu pula dengan industri atau perusahaan, pendirian perusahaan dilakukan untuk membuat sebuah terobosan bagi pengolahan hasil-hasil alam wilayah yang bersangkutan dengan pemikiran faktor ekonomis sebuah produk, satu misal berdirinya pabrik Tapioka. Pabrik ini berdiri di kota Malang karena umbi (ketela rambat) merupakan salah satu hasil pertanian di daerah itu.

# DAFTAR PUSTAKA